

Proyek Infrastruktur Rp 348 T Gunakan Skema PINA

IST

Oleh Nasori

► JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengundang investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan investasi nonanggaran (PINA). Hingga akhir Desember 2017, 34 proyek infrastruktur dengan nilai total mencapai Rp 348,2 triliun atau US\$ 25,8 miliar, direncanakan menggunakan skema PINA.

Ke-34 proyek infrastruktur tersebut mencakup 19 proyek ruas jalan tol, empat proyek penerbangan, 10 proyek pembangkit dan transmisi listrik, serta satu proyek pariwisata. “Kalau investor kita tidak pilih-pilih, kami undang yang berminat dan mempunyai kemampuan, keuangan, dan *track record*,” kata Bambang dalam acara PINA Day 2018 di Jakarta, Kamis (18/1).

Ia mengatakan, investasi asing yang memiliki kemauan, minat maupun pengalaman membangun di berbagai negara berkembang bisa terlibat dalam penyediaan sarana infrastruktur di Indonesia. Ia mencontohkan investor seperti Australia yang ternyata telah membangun proyek jalan tol di Meksiko, padahal secara geografis, investor tersebut idealnya membangun di Indonesia.

“Kita harus membuat ekosistem agar mereka mau investasi infrastruktur di Indonesia dengan menyiapkan regulasi dan kesiapan proyek serta perlindungan yang dibutuhkan oleh investor asing,” ujar mantan menteri keuangan tersebut.

Perjanjian investasi PINA yang baru disepakati adalah antara pemerintah dengan Huatsing Housing Holding Co LTD, yang merupakan investor asal Tiongkok, pada 12 Januari 2018. Dalam perjanjian ini, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia bertindak sebagai *arranger* penempatan dana. Struktur skema transaksi investasi dari Huatsing ini menggunakan tiga bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI.

Perjanjian investasi ini meliputi proyek Waskita Toll Road senilai US\$ 10 miliar, PLTU Meulaboh 2x200 MW

senilai US\$ 540 juta, Bandar Udara Internasional Jawa Barat senilai US\$ 2,2 miliar, dan Apartemen Kelas Menengah (PT Kopelland) senilai US\$ 500 juta.

Jadwal pencairan investasi ini adalah pada Februari 2018 untuk Waskita Toll Road dan PLTU Meulaboh sebesar US\$ 825 juta, pada Maret 2018 sebesar US\$ 500 juta untuk Bandar Udara Internasional Jawa Barat, dan Apartemen Kelas Menengah sebesar US\$ 500 juta pada September 2018.

Meski demikian, kata Bambang, tidak tertutup kemungkinan investor dalam negeri yang memiliki kualifikasi bisa ikut terlibat dalam pembiayaan infrastruktur melalui skema PINA. “Perusahaan Indonesia bisa menjadi investor di negara sendiri. Ini untuk pembelajaran, tidak hanya BUMN dan swasta, tapi juga koperasi. Koperasi bisa masuk ke infrastruktur,” ujar Bambang.

Ia menambahkan berbagai proyek potensial yang *feasible* untuk dibiayai oleh skema PINA telah disiapkan pemerintah, seperti jalan tol dan pembangkit listrik. “Kami juga mendorong pembangunan bandar udara, pelabuhan laut maupun sistem transmisi gas yang bisa didukung oleh aktivitas PINA dalam jangka pendek,” ujar Bambang.

Saat ini, Bappenas telah mengelola PINA Center untuk mendukung skema pembiayaan ini serta memiliki tiga fungsi utama yaitu penyediaan fasilitas menuju tahap *financial close*, penyiapan daftar proyek dan informasi terkini serta menciptakan ekosistem bisnis untuk mempermu-

dah investasi.

Dalam skema PINA yang diluncurkan sejak awal 2017 ini, investor difasilitasi dalam pembiayaan ekuitas dengan dua cara yaitu melalui pembiayaan ekuitas langsung dan penyediaan instrumen investasi ekuitas. Untuk penyertaan ekuitas langsung bisa dilakukan investor kepada perusahaan infrastruktur tanpa perantara, sehingga investor dapat tercatat langsung sebagai pemegang saham.

Sedangkan, melalui penyediaan instrumen, investor dapat membeli instrumen investasi ekuitas untuk mem-

perdalam pasar modal seperti reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), *perpetuity notes*, *callable preferred stocks*, dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif (DINFRA) dan instrumen lainnya yang mendekati ekuitas.

Peran Signifikansi

Pada kesempatan yang sama, CEO PINA Ekoputro Adijayanto menjelaskan, PINA memiliki peran signifikansi dalam percepatan *financial close* proyek melalui tiga fungsi utama. Pertama, *facilitation function* yaitu membawa

proyek strategis nasional ke tahap *financial close* dan mempromosikan *pipeline* proyek melalui *road show* internasional dan pertemuan bilateral.

Kedua, *pipelining function* yaitu menyiapkan daftar proyek yang siap ditawarkan ke investor dan juga daftar investor yang tertarik untuk mengikuti skema PINA serta menyediakan informasi terkini mengenai perkembangan proyek untuk investor.

Ketiga, *ecosystem function* dengan menciptakan ekonomi bisnis yang mempermudah berinvestasi di Indonesia melalui penilaian regulasi investasi

yang ada, melakukan rekomendasi kebijakan dengan mempercepat implementasi pembiayaan kreatif seperti RDPT, *perpetuity notes*, dan DINFRA.

Adapun pembiayaan dengan skema PINA dalam fasilitasi proyek infrastruktur yang telah dicapai di antaranya adalah kerja sama PT Nusantara Infrastruktur Tbk dengan partner internasional strategis sebesar Rp 1,81 triliun. Selain itu, partisipasi ekuitas Rp 832,0 miliar oleh PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) pada proyek Bandara Kertajati di Majalengka melalui RDPT. (c01)